

## DAFTAR PUSTAKA

Asshiddiqie, J. (2006). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Konstitusi Press.

Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Konstitusi Press.

Dewaji, H. A. (2023). *Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kawasan Pasar Lama* (Skripsi Sarjana, Universitas Lambung Mangkurat). Digital Library ULM.

<https://digilib.ulm.ac.id/archive/digital/detailed.php?code=27031>

Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (ed. Indonesia oleh M. Hani Handoko). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Dunn, W. N. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Terj. Kusumastuti). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Edward III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington D.C.: Congressional Quarterly Press.

Hadjon, P. M. (2007). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Hadjon, P. M., & Tatiek, S. (2018). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Hakim, L. (2016). *Dinamika Penataan Pedagang Kaki Lima: Studi di Kawasan Perkotaan*. Jakarta: Rajawali Pers.

Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing.

Ibrahim, J. (2006). *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Surabaya: Bayumedia.

Iswahyuni, A. (2022). *Implementasi Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima di Kota Banjarmasin* (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin). Institutional Repository UIN Antasari. <https://idr.uin-antasari.ac.id/21521/>

Kelsen, H. (2006). *Teori Hukum Murni (Pure Theory of Law)* (Terj. Raisul Muttaqien). Bandung: Nusa Media.

Kelsen, H. (2008). *Teori Hukum Murni (Pure Theory of Law)* (Terj. Raisul

Muttaqien). Bandung: Nuansa Cendekia.

Marzuki, P. M. (2005). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.

Misrawati. (2023). *Implementasi Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dalam Perspektif Fikih Siyasah* (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin). Institutional Repository UIN Antasari.

Pemerintah Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82.

Pemerintah Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244.

Pemerintah Indonesia. (2020). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245.

Pemerintah Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 140.

Suharto, E. (2010). *Kebijakan Sosial: Perspektif dan Strategi Intervensi*. Bandung: Alfabeta.

Utrecht, E. (1980). *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan.

Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488. <https://doi.org/10.1177/009539977500600404>

Sugiannor, Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima Di Kota Banjarmasin. *Madika: Jurnal Politik dan Governance*, Vol. 2. No. 2, 2022 (1-33)

M. Ferdiansyah, Afif Khalid, Dadin Eka Saputra. Implementasi Penegakan Hukum Terhadap Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Banjarmasin (Studi Kasus di

Wilayah Hukum Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin). Jurnal Politik dan Governance, Vol. 4. No. 2, 2022 (26-38)

Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), hlm. 118.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 ayat (6).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Pemerintah Kota Banjarmasin, Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL, Pasal 2.

Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi dan Materi Muatan, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 45.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28C dan 28H.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012.

Hans Kelsen, General Theory of Law and State, (New York: Russell & Russell, 2007), hlm. 111.